

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Definisi Konsep**

Untuk memberikan pengertian yang sama antara penulis dan pembaca berikut disampaikan pengertian istilah atau definisi konsep. Istilah-istilah itu adalah:

##### **1. Pengertian Strategi**

Adisasmita (2006:121) bahwa “Strategi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai langkah-langkah pelaksanaannya yang diperlukan perumusan serangkaian kebijakan”. Menurut Rangkuti (2016:3) mengemukakan bahwa “strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya”.

Menurut Higgins (Salusu, 2000:101) telah menjelaskan adanya 4 (empat) tingkatan strategi adalah sebagai berikut: Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu, *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy*, dan *functional strategy*.

##### **2. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah

upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Menurut Owen dan Roger (Suharto, 2014:120) bahwa “Program adalah seperangkat aktivitas atau kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu”. Menurut Hasibuan (2012:72) pengertian program dapat dirumuskan secara jelas bahwa “Program adalah suatu jenis rencana yang konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaannya”. Dalam buku Tim Penggerak PKK Pusat (2015:13) yang menjadi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu:

- a. Penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- b. Gotong-Royong;
- c. Pangan;
- d. Sandang;
- e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f. Pendidikan dan keterampilan;
- g. Kesehatan;

- h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
- i. Kelestarian lingkungan hidup; serta
- j. Perencanaan Sehat.

## **2.2. Kajian Teori**

### **2.2.1 Pembangunan**

Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11). Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk, 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul, 2014:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat, dkk: 2011:3). Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa.

Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi. Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya, (Subandi, 2011:13)

Selanjutnya Todaro (2010:28) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:

- a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*)
- b. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan
- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai “kehidupan yang serba lebih baik” semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut (Todaro, 2010:28):

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan

kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

- a. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka

### 2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat (2010:185) menyatakan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan bermaksud untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara mandiri memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.

Menurut Rosidin (2019:73) menyatakan secara garis besar pemberdayaan masyarakat merupakan usaha atau upaya untuk memandirikan dan menyejahterakan masyarakat. Menurut Mulyaman, (2016:65) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, melalui partisipasi, demokratisasi, untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan sehingga rakyat, organisasi dan komunitas mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya pembelajaran dan pengalaman sosial serta tujuan berupa upaya.

Dengan demikian, hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Dalam pelaksanaannya pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Hal tersebut merupakan tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan.

b. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- 1) Tahap kesadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Sulistiyani, 2014:82).

c. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Metode pemberdayaan masyarakat di bagi dua yaitu meliputi Metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*), dan metode RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

1) Metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*)

PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan kelurahan dari dengan dan oleh masyarakat kelurahan. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode pendekatan yang

memungkinkan masyarakat kelurahan untuk saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan kelurahan, membuat rencana dan bertindak.

Tujuan kegiatan PRA yang utama ialah untuk menghasilkan rancangan program yang sesuai dengan hasrat dan keadaan masyarakat. Terlebih itu, tujuan pendidikannya adalah untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam menganalisa keadaan mereka sendiri dan melakukan perencanaan melalui kegiatan aksi. Dapat disebutkan bahwa PRA adalah sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan (Wrihatnolo, 2010:42).

Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam metode PRA:

- a) Menggali informasi tentang keberadaan lingkungan dan masyarakat secara umum.
- b) Perumusan masalah dan penetapan prioritas guna memperoleh rumusan atas dasar masalah dan potensi setempat.
- c) Identifikasi alternatif pemecahan masalah atau pengembangan gagasan guna membahas berbagai kemungkinan pemecahan masalah melalui urun rembuk masyarakat.
- d) Pemilihan alternatif pemecahan yang paling tepat sesuai dengan kemampuan masyarakat dan sumberdaya yang tersedia dalam kaitannya dengan swadaya.
- e) Perencanaan penerapan gagasan dengan pemecahan masalah tersebut secara konkrit agar implementasinya dapat secara mudah dipantau.
- f) Penyajian rencana kegiatan guna mendapatkan masukan untuk penyempurnaannya di tingkat yang lebih besar.
- g) Pelaksanaan dan pengorganisasian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masyarakat.
- h) Pemantauan dan pengarahan kegiatan untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun.

- i) Evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk melihat hasil sesuai yang diharapkan, masalah yang telah terpecahkan, munculnya masalah lanjutan, dll
- 2) Metode RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

RRA (*Rapid Rural Appraisal*) merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktek, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Meskipun sering dikatakan sebagai teknik penelitian yang “cepat dan kasar/kotor” tetapi RRA dinilai masih lebih baik dibanding teknik-teknik kuantitatif klasik.

Metode RRA digunakan untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan kelurahan harus diambil segera. Dewasa ini banyak program pembangunan yang dilaksanakan sebelum adanya kegiatan pengumpulan semua informasi di daerah sasaran. Konsekuensinya, banyak program pembangunan yang gagal atau tidak dapat diterima oleh kelompok sasaran meskipun program-program tersebut sudah direncanakan dan dipersiapkan secara matang, karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam penyusunan prioritas dan pemecahan masalahnya.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah:

- 1) Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal, dan kaum kecil, antara lain buruh tani, masyarakat terbelakang, masyarakat miskin.
- 2) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat (Mulyaman, 2016:71).



#### d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:167) strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi sering rancu dengan: metode, teknik, atau taktik.

Menurut Kartasasmita dalam Mulyaman (2016:67), upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang pokok adalah peningkatan tarap pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat diakses oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan tempat terkonsentrasinya penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program yang umum yang berlaku untuk semua tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.
- 3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat berdasar sifatnya. Dalam rangka

ini, adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah sangat diperlukan.

Terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat:

- 1) Motivasi  
Anggota masyarakat dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.
- 2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan  
Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan matapencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.
- 3) Manajemen diri  
Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.
- 4) Mobilisasi sumber  
Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang, jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

- 5) Pembangunan dan pengembangan jaringan  
Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin (Wrihatnolo, 2010:45).

Sumaryadi dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:169)

mengemukakan adanya lima generasi strategi pemberdayaan, yaitu:

- 1) Generasi yang mengutamakan *relief and welfare*, yaitu strategi yang lebih mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan setiap individu dan masyarakat, seperti: sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan.
- 2) Strategi *community development* atau *small scale reliant local development*, yang lebih mengutamakan pada kesehatan, penerapan teknologi tepat-guna, dan pembangunan infrastruktur. Menurutny, strategi ini tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan pembangunan dari atas (*top down approach*), tetapi harus dilakukan pendekatan dari bawah (*bottom-up approach*).
- 3) Generasi *sustainable system development*, yang lebih mengharapkan terjadinya perubahan pada tingkat regional dan nasional. Melalui strategi ini, diharapkan terjadi perubahan kebijakan yang keluar dari tingkat daerah (*local*) ke tingkat regional, nasional, dan internasional, utamanya terkait dengan dampak pembangunan yang terlalu eksploitatif dan mengabaikan pelestarian/keberlanjutan pembangunan.
- 4) Generasi untuk mengembangkan gerakan masyarakat (*people movement*), melalui pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan lokal, serta mobilisasi sumber daya lokal yang ada dan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Strategi ini, tidak sekadar mempengaruhi kebijakan, tetapi sekaligus juga mengharapkan terjadinya perubahan di dalam pelaksanaannya.
- 5) Generasi pemberdayaan masyarakat (*empowering people*) yang memperhatikan arti penting perkembangan, teknologi, persaingan, dan kerjasama. Generasi ini memperjuangkan ruang gerak yang lebih terbuka terhadap kemampuan dan keberanian masyarakat, dan pengakuan pemerintah terhadap inisiatif lokal.

Ismawan (Priyono, 1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:170) menetapkan adanya lima program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

- 1) Pengembangan sumberdaya manusia.
- 2) Pengembangan kelembagaan kelompok.
- 3) Pemupukan modal masyarakat (swasta).
- 4) Pengembangan usaha produktif.
- 5) Penyediaan informasi tepat-guna.

Beberapa strategi pendekatan yang ditempuh dalam pelaksanaan proses pemberdayaan Kindervanter (Silawati, 2003:23 dalam Wati, 2015:22-23) sebagai berikut:

- 1) “*Need Oriented*”, yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan individu. Mengidentifikasi masalah dalam sumber daya yang dimiliki masyarakat. Proses ini melibatkan masyarakat secara efektif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri.
- 2) “*Endogenous*”, yaitu pendekatan yang berorientasi pada kondisi dan kenyataan yang berlangsung di masyarakat setempat.
- 3) “*Self Reliance*”, yaitu merupakan pendekatan yang berorientasi pada terciptanya rasa mampu sendiri dan mandiri. Masyarakat sudah dapat dianggap mandiri. Masyarakat sudah dapat dianggap mandiri dan dapat menggunakan kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan mencapai kesejahteraan
- 4) “*Ecologicaaly Sound*”, yaitu merupakan pendekatan yang tidak melupakan aspek lingkungan.
- 5) “*Basell on Strctural Transformation*”, yaitu pendekatan yang berorientasi pada perubahan struktur dan sistem.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto (2005) dalam Anwas (2014:87-88), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu:

- 1) **Pemungkinan**; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
- 2) **Penguatan**; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) **Perlindungan**; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) **Penyokong**; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya.
- 5) **Pemeliharaan**; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

### 2.2.3 Konsep Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

#### a. Pengertian Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 pasal 1 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan Keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan wadah yang menggali dan mengerakkan partisipasi masyarakat khususnya dalam lingkungan keluarga, ini berarti wadah yang menampung serta melaksanakan aspirasi dan inisiatif masyarakat dalam usaha menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) sebagai mekanisme dan gerakan yang telah berkembang di desa-desa di seluruh pelosok tanah air, telah menunjukkan keberhasilannya dengan perempuan sebagai peran utamanya. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangun masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun mengerahkan dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 23).

PKK sebagai gerakan pembinaan masyarakat dimulai dari seminar *Home Economic* di Bogor tahun 1957 dan disusun mata mata pelajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga tahun 1961 serta menghasilkan 10 segi kehidupan keluarga yaitu *Family relation* (Hubungan inter dan antara keluarga), *Child Care* (Membimbing dan mengasuh anak), *Food* (makanan), *Clothing* (Makanan), *Housing* (Perumahan), *Health* (Kesehatan), *Family*

*Income* (Keuangan Keluarga), *Home Management* (Tatalaksana Rumah Tangga), *Security* (Keamanan Lahir dan Batin), *Sound Planing* (Perencanaan Sehat). (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 23).

Pada tahun 1967 oleh istri Gubernur Jawa Tengah (Ibu Istriati Moenadi) dikembangkan menjadi 10 segi (PKK) yang meliputi pengahayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang perumahan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan beroperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat sesuai dengan buku kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 23).

Surat Kawat Mendagri No. SUS 3/6/12 tanggal 27 Desember 1972, pendidikan dirubah menjadi pembinaan dan dilaksanakan diseluruh Indonesia, selanjutnya tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai hari Kesatuan Gerakan PKK. TAP MPR No. 11/MPR/1978 mengamanatkan kaum perempuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera. TAP MPR No. IV/MPR/1984 PKK sebagai salah satu wahana P2W dalam upaya mensejahterakan keluarga. Adanya pengakuan keberhasilan PKK baik oleh masyarakat, pemerintah maupun lembaga internasional seperti *Maurices Pate* (UNICEF), *Sasakawa Health Prize award* (WHO), *Nouma Litaricy* (UNESCO), Keberhasilan PIN (depkes). Rakernaslub PKK tanggal 31 Oktober-2 November 2000 di Bandung menghasilkan beberapa kesepakatan, yang terpenting adalah perubahan pembinaan kesejahteraan

keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 21).

Kelembagan PKK disebut tim penggerak PKK (TP PKK) adalah mitra kerja pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). TP PKK ini meliputi Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan. Hubungan kerja antara TP PKK pusat dengan TP PKK provinsi, kabupaten/kota kecamatan dan desa/kelurahan adalah bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis serta mendekatkan jangkauan pembinaan keluarga-keluarga dibentuk kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan kelompok Dasawisma (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 21).

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) upaya untuk mensejahterakan masyarakat khususnya perempuan dengan kemampuan memperbaiki dan meningkatkan kedudukan dalam masyarakat serta dapat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia dan berbudi luhur, sehat, maju dan mandiri, berkesetaraan dan berkeadilan gender serta berkesadaran hukum dan lingkungan.

b. Faktor/Komponen Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Dengan adanya kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan keluarga pada umumnya



yang berpedoman pada pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Selain memiliki program-program pokok, PKK juga memiliki panca dharma PKK. Isi dari panca dharma ini tentang peranan-peranan perempuan dalam kehidupan (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 25), yaitu sebagai berikut:

- 1) Wanita sebagai pendamping suami
- 2) Wanita sebagai pengelola rumah tangga
- 3) Wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak
- 4) Wanita sebagai pencari nafkah tambahan
- 5) Wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat

Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor: 14/KEP/PKK Pst/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015 Tentang Hasil Rakernas VIII Bidang Rencana Kerja 5 Tahun PKK Tahun 2015-2020. Sepuluh program pokok PKK yaitu: penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, papan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat. Kelompok kerja (POKJA) sebagai pelaksana program dan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara terpadu dilaksanakan oleh pokja-pokja dengan berpedoman pada 10 program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) :

a. Pokja I

1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila

Penghayatan dan pengamalan Pancasila dengan menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran bemasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilaksanakan pemahaman secara terpadu. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) mencakup lima (5) unsur yaitu kecintaan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan atas Pancasila, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara. Kesadaran Hukum (KADARKUM) adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan diprioritaskan di PKK untuk pencegahan KDRT, *trafficking*, perlindungan anak, NARKOBA. Pola asuh anak remaja juga diperuntukkan untuk menumbuhkan dan membangun perilaku, budi pekerti, sopan santun di dalam keluarga sesuai budaya bangsa begitu juga dengan pemahaman dan keterampilan (*life skill and parenting skill*) diupayakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2) Gotong royong

Gotong royong dilaksanakan dengan membangun kerja sama yang baik, menumbuhkan kesadaran, kesetiakawanan sosial, bertenggang rasa, kebersamaan menghormati antar umat beragama antar sesama keluarga, warga, kelompok untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan. Memberdayakan lanjut usia agar dapat menjaga kesehatan fisik dan mental, kebugaran, keterampilan agar dapat melaksanakan kegiatan secara produktif

dan menjadi teladan bagi keluarga dan lingkungannya serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan bakti

## Pokja II

### 1) Pendidikan dan keterampilan

Pendidikan dan keterampilan mempunyai prioritas program meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan keluarga yang mempunyai anak balita mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal sebagaimana melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program Bina Keluarga Balita (BKB). Meningkatkan mutu dan jumlah pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan mengadakan pelatih/*Training*. Meningkatkan pengetahuan TP PKK dalam kegiatan Pos PAUD melalui kegiatan PAUD yang diintegrasikan dengan BKB dan Posyandu dengan perteman mitra PAUD bekerja sama dengan pokja IV dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kader dalam mendidik anak usia dini. Meningkatkan kejar paket A, B dan C dengan penyuluhan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dan pengembangan Keaksaraan Fungsional (KF) dan membudidayakan minat baca melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) bekerja sama dengan instansi terkait.

### 2) Pengembangan kehidupan berkoperasi

Prioritas program kehidupan berkoperasi dengan meningkatkan kelompok dan kualitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) selain menumbuhkan kesadaran serta kemampuan berwirausaha keluarga

juga sebagai usaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja. UP2K PKK dengan memanfaatkan koperasi sebagai salah satu upaya perbaikan ekonomi keluarga dan mendorong terbentuknya koperasi yang dikelola oleh PKK.

b. Pokja III

1) Pangan

Prioritas program pangan dengan mewujudkan ketahanan pangan keluarga melalui penganeekaragaman pangan dengan pola pangan 3B (beragam, bergizi, berimbang) sesuai potensi daerah. Mengoptimalkan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA PKK) dengan tanaman pangan dan tanaman produktif/keras, minimal untuk memenuhi keperluan keluarga dan tabungan serta meningkatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TGG) untuk menunjang usaha agrobisnis, hortikultura, tanaman buah, perikanan, peternakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam mencapai taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.

2) Sandang

Proritas program sandang yaitu mengupayakan hak paten untuk melindungi hak cipta desain dan mengupayakan keikutsertaan dalam pameran dan lomba baik tingkat lokal, nasional dan internasional. Mengadakan kerja sama dengan para desainer, pengusaha, industri sandang, pariwisata dan membudidayakan perilaku berbusana sesuai dengan moral

budaya Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat mencintai produksi dalam negeri (aku cinta produk Indonesia).

### 3) Perumahan dan tata laksana rumah tangga

Menumbuh kembangkan kembali Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) melalui pemugaran rumah layak huni terutama keluarga miskin dan pengungsi dengan asas Tri Bina (bina usaha, bina manusia dan bina lingkungan), gotong royong serta mengupayakan bantuan dari instansi/dinas terkait, bank, swasta dan masyarakat.

### c. Pojka IV

#### 1) Kesehatan

Kesehatan merupakan proiritas utama keluarga dengan memantapkan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) dalam upaya menurunkan prefalensi anak balita kurang gizi, gizi seimbang untuk ibu hamil, ibu menyusui dengan pemberian suplemen zat gizi, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam (6) bulan, Makanan Pendamping (MP ASI) dan pemberian makanan tambahan bagi balita, lansia di posyandu, menjadikan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai kebiasaan sehari-hari dengan cuci tangan pakai sabun, menggunting kuku dan optimalisasi posyandu.

#### 2) Kelestarian Lingkungan Hidup

Lingkungan bersih dan sehat dengan menanamkan kesadaran tentang kebersihan pengelolaan kamar mandi dan jamban keluarga, Saluran

Pembuangan Air Limbah (SPAL). Menanamkan kebiasaan sampah organik dan non organik serta bahan berbahaya dan beracun untuk didaur ulang selajutnnya ditempat yang benar. Kelestarian lingkungan hidup dengan mengembangkan kualitas lingkungan dan pemukiman, kebersihan dan kesehatan, pada pemukiman yang padat dalam rangka terwujudnya kota bersih dan sehat (*Healt cities*) serta pencegahan banjir dengan tidak menebang pohon sembarangan karena pohon sebagai paru-paru kota.

### 3) Perencanaan Sehat

Meningkatkan kegiatan dalam program perencanaan sehat dengan meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya pemahaman dan kesertaan dalam program keluarga berencana dan berorientasi pada masa depan dengan cara menabung serta mengatur keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keuangan keluarga. Meningkatkan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin. Kegiatan-kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan, yang disebut kelompok khusus (POKSUS) tanpa menambah pokja baru, berbeda dalam lingkungan sekretaris umum/pokja-pokja yang bersangkutan (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010:42).

## 2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), berikut peneliti sampaikan beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk

membandingkan perbedaan penelitian yang peneliti laksanakan dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

2.3.1 Trisnawati (2017) dengan judul Skripsi: “Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan, strategi PKK dalam pemberdayaan perempuan penguatan potensi perempuan melalui kegiatan pelatihan keterampilan berupa (kerajinan tangan daur ulang, pelatihan memasak dan pelatihan menanam), penguatan peluang berwirausaha, menciptakan usaha sendiri dirumah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dari pelatihan yang diberikan oleh pkk dan kemampuan mengelola keuangan dengan metode budgeting. Strategi tersebut dilakukan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mensejahterakan keluarga dengan cara memberikan akses ibu-ibu untuk memperoleh akses dalam dunia kerja dengan berwirausaha sebagai upaya untuk menambah pendapatan yang dapat menciptakan kesejahteraan keluarga.

1.3.2 Pathony (2019) dengan judul Skripsi: “Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang”. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menemukan proses pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan dan gerakan kesejahteraan keluarga sesuai dengan teori Pemberdayaan sebagai

proses yang dikemukakan oleh Edi Suharto yaitu Proses pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan di Kabupaten Subang belum optimal. Kesimpulan temuan di lapangan yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan belum dinilai sesuai dengan teori yang digunakan.

2.3.3. Susatin (2019) dengan judul skripsi: “Strategi Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Program Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Gandoang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan Program Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Gandoang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes pada umumnya sudah berjalan, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya berdasarkan tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Kooten, Salusu (2000:104). Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan respon dari masyarakat, rendahnya kapasitas/kemampuan kader PKK dalam melakukan pengarahan, kurangnya kemauan/minat dari masyarakat, fasilitas kurang memadai, kurangnya pemahaman yang dimiliki kader PKK, anggaran yang dimiliki PKK terbatas, kader PKK kurang mematuhi terhadap aturan atau sanksi yang telah ditetapkan atau dibuat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga



(PKK) melakukan sosialisasi dengan rutin terhadap masyarakat, PKK mengadakan pelatihan dan pendidikan khususnya untuk kader PKK, PKK mengadakan pengajian secara rutin sekaligus melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi kehidupan masyarakat.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya baik penelitian Trisnawati (2017), Pathony (2019) dan Susatin (2019) yakni terletak pada organisasi yang diberdayakan untuk memerdayakan masyarakat yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta metode dan pendekatan yang digunakan yakni jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bahkan pada penelitian yang dilakukan Trisnawati (2017) dan Susatin (2019) memiliki tambahan persamaan dengan yang peneliti lakukan yakni berfokus pada deskripsi dan analisis strategi dari subyek penelitian.

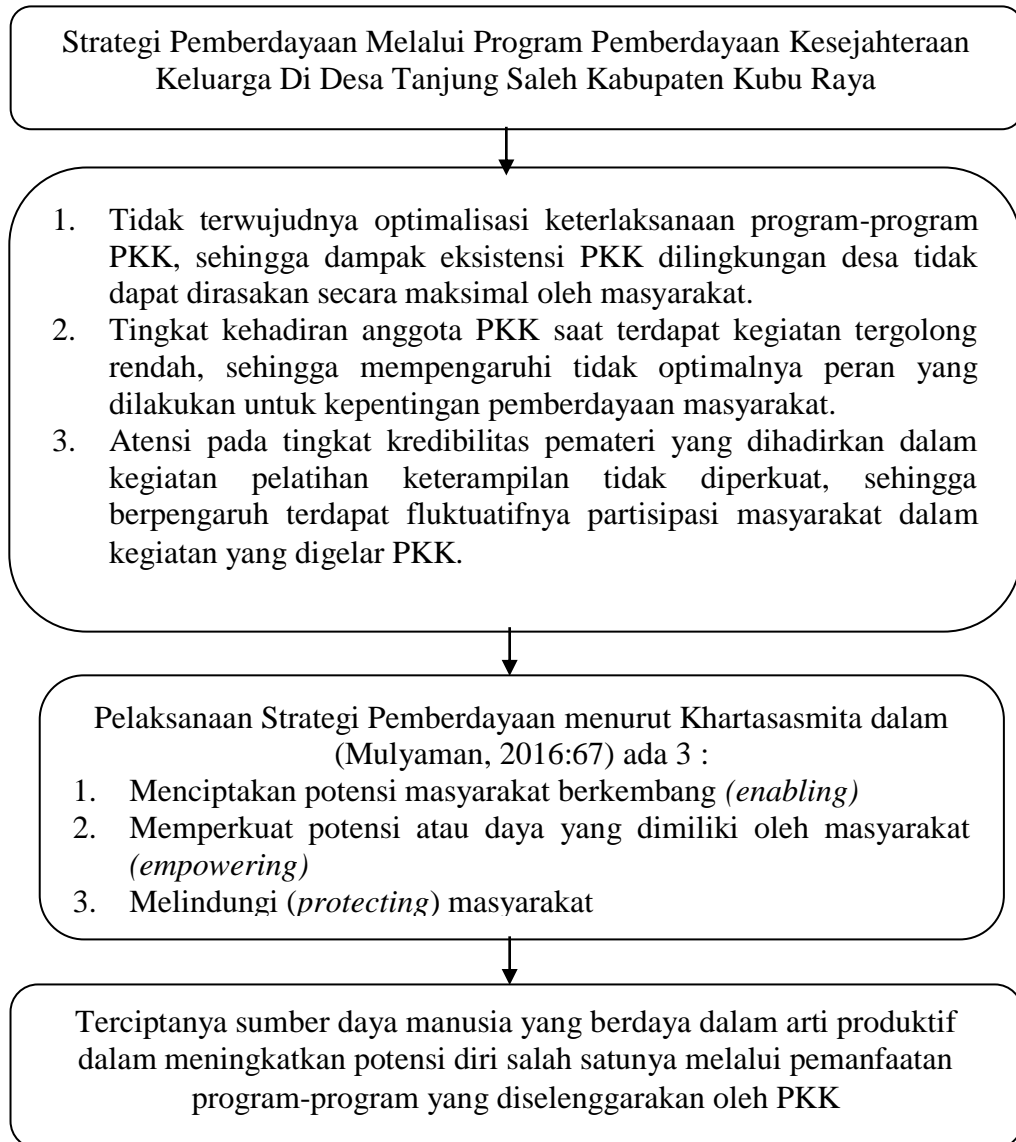
Sedangkan hal yang diidentifikasi sebagai perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan yaitu mencakup lokasi penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2017) berfokus pada pemberdayaan kaum perempuan sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti masyarakat yang dimaksudkan yakni masyarakat diberbagai kalangan khususnya keluarga di lingkungan lokasi penelitian. Sedangkan perbedaan yang terdapat antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Susatin (2019) yakni pada objek penelitian, pada penelitian

yang dilakukan peneliti diorientasikan pada pemberdayaan masyarakat atau memberikan dampak secara eksternal sedangkan pada penelitian Susatin (2019) diarahkan pada peningkatan Program Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau memberikan dampak secara internal.

#### **2.4 Kerangka Pikir**

Dari hasil prariset yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian, diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang memerlukan pemberlakuan pendekatan strategi yang tepat sasaran agar Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Tanjung Saleh dapat memaksimalkan peran dalam memberdayakan masyarakat. Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



## 2.5 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi dalam menciptakan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya?
2. Bagaimana strategi dalam memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya?
3. Bagaimana strategi dalam melindungi (*protecting*) masyarakat melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya?